

BAB I

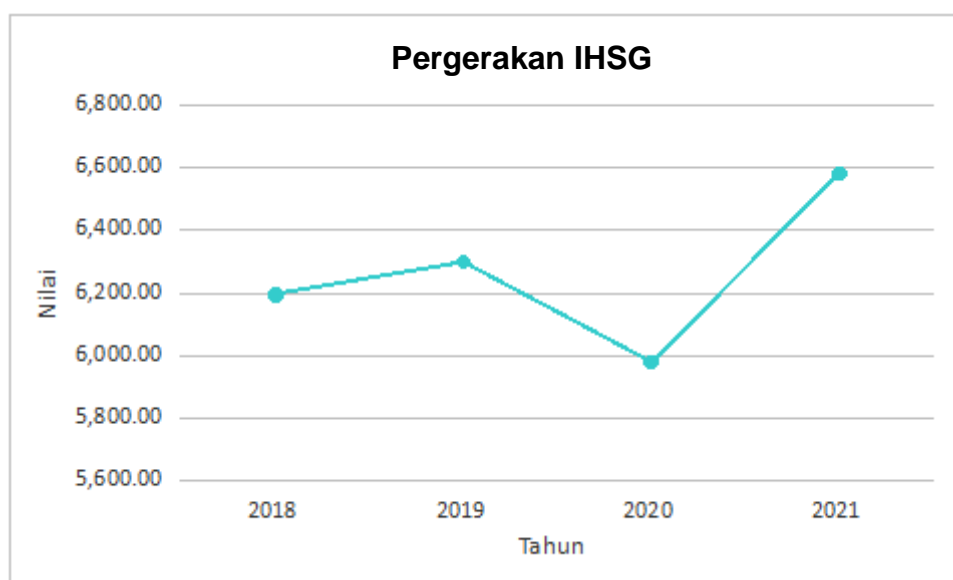
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya sebuah negara terlihat dari adanya pembangunan secara berkala di berbagai sektor, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang di dunia dan memiliki pembangunan di beberapa sektor yang cepat termasuk sektor ekonomi. Pembangunan sektor perekonomian ikut berdampak ke arah positif sehingga mampu menyebabkan timbulnya rasa antusiasme para pengusaha untuk mengelola perusahaannya di Indonesia. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting diperhatikan dalam mencapai kelangsungan hidup perusahaan, karena pada dasarnya keuangan menjadi sumber dana dari awal berdiri sampai tahap pengelolaan operasional perusahaan. Pengelolaan yang baik terhadap sumber dana dibutuhkan untuk mencukupi setiap kegiatan utama di perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Salah satu tujuan jangka panjang berdirinya sebuah perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Optimalisasi nilai perusahaan tercapai apabila pemegang saham merasakan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan gambaran prestasi yang bisa dicapai perusahaan yang tercermin melalui harga saham perusahaan karena adanya investasi. Berinvestasi dalam saham perusahaan termasuk dalam investasi untuk sebagian ekuitas perusahaan (I. G. N. H. Wiguna et al., 2021). Bursa Efek Indonesia menjadi tempat transaksi saham bagi perusahaan yang telah *go public* sehingga investor dapat memberikan penilaian tentang nilai perusahaan

berdasarkan pengamatan pergerakan harga saham. Home & James (1995) menyatakan bahwa tingginya harga saham menentukan tinggi nilai perusahaan, sebaliknya semakin rendah harga saham maka nilai perusahaan juga semakin rendah (Azis, 2016).



Gambar 1.1
Pergerakan IHSG
(Sumber: Ipot News bersumber dari BEI, 2023)

Berdasarkan Ipot News, Indeks Harga Saham Gabungan selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada 28 Desember 2018, IHSG ditutup pada level 6.194,50. Pada 30 Desember 2019, IHSG ditutup pada level 6.299,54 (menguat 1,70%). IHSG ditutup di level 5,979,07 (melemah -5,09%) pada 30 Desember 2020. Pada 30 Desember 2021, IHSG mengalami penguatan 10,08% dan berhasil ditutup pada level 6.581,48. Naik turunnya tingkat IHSG perusahaan terjadi akibat adanya pengaruh dari kepercayaan baik buruknya kinerja perusahaan. Strategi perusahaan untuk tetap mempertahankan nilai perusahaan salah satunya dengan cara memberikan *feedback* yang maksimal kepada investor

sehingga perusahaan dikatakan layak dan dapat bertahan dalam jangka waktu panjang.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara baik itu asetnya ataupun kepemilikannya. Dalam pemenuhan permintaan kebutuhan sektor BUMN diperlukan berbagai upaya untuk menghasilkan barang dan jasa yang mengikuti aturan pemerintahan guna mendukung tujuan dasar dibentuknya BUMN. Oleh karena itu sektor ini penting keberadaannya karena pemerintah ikut andil mengambil peran sebagai salah satu pelaku ekonomi guna memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat yang bagus akan hadirnya perusahaan BUMN yang modal utamanya datang dari pemerintah membuat optimalisasi maksimal dirasakan oleh BUMN. Nilai perusahaan BUMN semakin lama diharapkan dapat meningkat optimal akibat kepercayaan penuh masyarakat oleh kinerja perusahaan berbasis pemerintah ini.

Teori *stakeholder* adalah strategi manajemen perusahaan yang penerapannya ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Mardikanto, 2014). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya sebuah entitas yang mengedepankan kepentingan pribadi tetapi juga memberikan manfaat kepada *stakeholder* nya. Keberadaan perusahaan terpengaruh dari wujud dukungan para *stakeholder* nya (Ulum, 2017). Dengan demikian, semakin kuat kepercayaan *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk mengoptimalkan nilai perusahaannya.

Dilansir dari kontan.co.id, Amin Ak menyatakan bahwa nilai return on asset (ROA) tahun 2021 hanya sebesar 1,36% dihitung dari total laba bersih

berbanding total aset yaitu Rp 9.295 triliun belum memenuhi laba seharusnya yaitu di atas Rp 372 triliun setahun. Amin AK selaku anggota Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa kurang optimal nya kinerja BUMN disebabkan karena belum secara penuh menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga dapat memaksimalkan laba BUMN di tahun berikutnya. Baik itu dewan direksi, komisaris maupun komite audit harus bekerja lebih profesional dan terbebas dari kepentingan politik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena di atas, pemenuhan nilai perusahaan bisa optimal apabila perusahaan menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. *Good Corporate Governance* adalah sebuah mekanisme yang secara langsung diimplementasikan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan serta mampu mengatasi masalah-masalah keuangan seperti manajemen laba. Salah satu faktor penyebab dari munculnya manajemen laba adalah adanya intensif keuangan yang cenderung menjadi potensi yang ingin dicapai oleh manajemen (Martadinata et al., 2021). Penerapan *good corporate governance* menjadi sebuah keharusan sebagai pondasi awal agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan (Widyati, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 117/M-MBU/2002 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara, prinsip *good corporate governance* berfungsi sebagai pedoman maupun kaidah yang sah ditetapkan untuk mengelola secara sehat sistem BUMN. Dalam prinsipnya, memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditur menjadi tanggungjawab perusahaan dengan menerapkan sistem *corporate governance* yang baik. Pemastian simetris nya

pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan harus berdasarkan kepentingan perusahaan sesuai dengan lima prinsip dasar GCG yaitu transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Putra, 2016). Terpenuhi hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) ditanggung dan dipastikan oleh perusahaan dengan berlandaskan Undang - undang.

Untuk mendukung dan mewujudkan penerapan mekanisme *good corporate governance* maka terdapat indikator pendukung dari pihak internal diantaranya komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen. Peran dewan direksi dalam perusahaan sebagai *agent* atau pengelola perusahaan yang memiliki kedudukan penuh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, dewan direksi membantu peningkatan kepercayaan investor karena kewajiban direksi yaitu aktif dalam pengambilan kebijakan yang subjektif (kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*) sehingga perusahaan dapat terkelola dengan baik berdampak pada nilai perusahaan yang semakin meningkat (Nita & Istikhoroh, 2019).

Hasil penelitian Syafitri et al (2018) menyimpulkan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat mengelola perusahaan dengan baik menyebabkan kinerja perusahaan menjadi meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan secara perlahan-lahan. Sedangkan, hasil penelitian Saputra (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena

jumlah dewan direksi yang besar cenderung tidak efektif mengambil keputusan dan kesusahan untuk berkomunikasi antar dewan.

Fungsi pengawasan manajemen dan wewenang dalam mengontrol manajer menjadi tugas pokok selaku dewan komisaris independen sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Adanya dewan komisaris independen berpeluang besar dalam mengontrol manajer untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Widyati, 2013). Keberadaan dewan komisaris independen menjadi mekanisme terdorong nya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan karena kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan oleh adanya karena pada dasarnya dewan komisaris internal menjadi perisai peluang perilaku eksploitasi.

Penelitian Sondokan et al (2019) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dewan komisaris memberikan pandangan transparan dan objektif sehingga timbulnya sikap kesetaraan atas kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*. Berbeda dengan penelitian Silalahi et al (2022) menyimpulkan secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen maka dapat menurunkan nilai perusahaan.

Komite audit merupakan komite yang membantu memperkuat fungsi dewan komisaris dengan menjalankan pengawasan berupa aspek keuangan seperti jalannya pelaporan keuangan, kepatuhan pihak internal akan *good corporate governance* dan pelaksanaan audit. Keberadaan komite audit memberikan peranan penting dalam menunjang terbentuknya *corporate governance* di perusahaan

karena kinerja manajemen termonitor secara berkala sehingga meminimalisir manajemen laba yang berdampak pada meningkatnya kualitas laba yang dilaporkan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan (Surjadi & Tobing, 2016).

Sejalan dengan hasil penelitian Amaliyah & Herwiyanti (2019) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan artian peningkatan nilai perusahaan terjadi pada perusahaan sektor pertambangan tercermin dari kepercayaan investor karena posisi komite audit. Berbanding dengan penelitian Mirnayanti & Rahmawati (2022) menyatakan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Naik turunnya perusahaan dapat terjadi akibat adanya perubahan ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan tergambar dari total aktiva, total modal, nilai pasar saham, ukuran pendapatan dan jumlah karyawan. Menurut Silalahi et al (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Sistem pendanaan dari suatu perusahaan dapat diperkuat maupun diperlemah oleh keberadaan ukuran perusahaan, hal tersebut mengapa ukuran perusahaan dikatakan dapat memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Kemudahan mendapatkan banyak sumber pendanaan untuk kegiatan operasional perusahaan tercapai apabila semakin besarnya ukuran perusahaan sehingga mendukung secara maksimal operasional perusahaan bagi peningkatan harga saham perusahaan (Maryam, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaan maka berkaitan dengan keputusan pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan dalam rangka pengoptimalan nilai perusahaan. Perusahaan berukuran besar memiliki pengawasan manajemen

laba yang lebih luas sehingga banyaknya jumlah komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen bertambah dan memiliki pengaruh untuk meningkatkan kinerja manajer perusahaan (Sujardi & Tobing, 2016). Sikap patuh dan lebih transparan dalam penyajian laporan keuangan diterapkan oleh manajer perusahaan karena perusahaan besar cenderung akan selalu menjadi perhatian (Suryani & Redawati, 2016). Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dan akan lebih tinggi untuk melaksanakan tata kelola yang baik sehingga upaya ini meminimalisir tingginya biaya keagenan yang dikeluarkan. Selain itu, *public demand* akan informasi yang dimiliki perusahaan berukuran besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Dengan pelaksanaan konsep tata kelola yang baik pada perusahaan berukuran besar menghasilkan transparansi dalam aktivitas operasional yang dilakukan sehingga membangkitkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas sehingga peneliti ingin mengkaji untuk memecahkan masalah naik turunnya nilai perusahaan dengan menganalisis dari aspek *good corporate governance* dengan menggunakan tiga proksi yaitu dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Selain itu adanya perbedaan hasil penelitian yang menunjukkan inkonsistensi pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan menyebabkan perlu adanya kajian ulang. Adanya moderasi ukuran perusahaan juga memunculkan inkonsistensi penelitian, sehingga peneliti ingin mengkaji kembali untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dalam mempengaruhi *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Landasan dipilihnya perusahaan BUMN yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI periode 2019-2021 karena perusahaan

yang pernah masuk dan terdaftar di indeks ini tergolong ke perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola yang baik serta memiliki total aset yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Perusahaan di Indonesia belum menerapkan secara baik *Good Corporate Governance* sebagai pondasi dalam persaingan antar perusahaan.
2. Belum optimal nya penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan BUMN Indonesia tercermin dari belum memenuhinya *return on asset* (ROA) di tahun 2021 yang hanya sebesar yaitu Rp 9.295 triliun.
3. Adanya fluktuasi IHSG dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2021 sehingga menyebabkan naik turunnya nilai perusahaan yang mengharuskan perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka pada penelitian ini penulis mengambil fokus penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Good Corporate Governance* menggunakan tiga proksi pengukuran yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran

komite audit. Objek penelitian yakni pada perusahaan BUMN dalam indeks SRI-KEHATI dengan pengambilan masing-masing variabel diperoleh melalui *annual report* dan *financial statement* yang diterbitkan pada tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menguji ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mendukung secara teoritis mengenai kontribusi dalam perkembangan secara umum teori-teori terkait yang berhubungan terhadap jurusan Akuntansi dan Ekonomi. Khususnya, berkontribusi dalam pengembangan Akuntansi Manajemen serta variabel yang dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan maupun pengaruh dari keberadaan variabel moderasi terhadap variabel independen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut yaitu *good corporate governance* mengacu kepada tiga proksi variabel yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit serta kaitannya dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kebutuhan informasi para investor di kalangan masyarakat umum sebagai alat bantu dalam menganalisa maupun pertimbangan berinvestasi di pasar modal yang tercermin dari kinerja perusahaan pada penelitian ini.